

ANALISIS PENGARUH *BUDGETARY SOLVENCY RATIO* TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS* PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Yevi Dwitayanti^{1*}, Rosy Armaini²⁾, dan Siska Aprianti³⁾
^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
Email: yevi_dwitayanti@yahoo.com

Abstrak

Budgetary solvency ratio merupakan perbandingan antara total pendapatan pemerintah daerah dengan total belanja yang harus dikeluarkan. Perilaku boros pemerintah daerah yang menguras separuh lebih anggarannya hanya untuk belanja pegawai dikhawatirkan akan mengantarkan pemerintah daerah pada kondisi kebangkrutan. Memprediksi mengenai potensi kebangkrutan sangat penting sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah yang selama ini terjadi. Sehingga dapat diambil suatu kebijakan untuk memperbaiki kondisi dan kinerjanya. *Financial distress* merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan dana (kesulitan keuangan) yang berakibat ketidakmampuan pemerintah untuk memberi pelayanan pada publik sesuai standar minimal mutu pelayanan yang telah ditetapkan.

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2017. Alat analisis yang akan digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) Versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *budgetary solvency ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*, artinya semakin tinggi nilai *budgetary solvency ratio* di pemerintah daerah maka semakin tinggi pula kemungkinan pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Kata kunci : *Budgetary Solvency Ratio* dan *Financial Distress*

Abstract

The budgetary solvency ratio is the ratio between total local government revenue and total expenditure to be spent. It is feared that the extravagant behavior of the regional government, which spends more than half of its budget for personnel expenditure, is feared to lead the regional government to bankruptcy. Predicting the potential for bankruptcy is very important as a material for evaluating the performance of local governments that have occurred so far. So that a policy can be taken to improve its condition and performance. Financial distress is the inability of the government to provide funds (financial distress) which results in the inability of the government to provide services to the public according to a predetermined minimum standard of service quality.

The sample used in this research is the financial statements of the district / city governments in South Sumatra Province in 2015-2017. The analytical tool to be used is a simple linear regression analysis using the SPSS (Statistical Package for Social Science) version 20 program. The results show that the budgetary solvency ratio has a positive and significant effect on financial distress, meaning that the higher the value of the budgetary solvency ratio in local governments, the higher the possibility of local governments experiencing financial distress.

Keywords: *Budgetary Solvency Ratio* and *Financial Distress*

1. PENDAHULUAN

Hakikat dari otonomi daerah adalah kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah, termasuk di

dalamnya pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan (Adi, 2012). Pembangunan daerah

sebagai bagian integral dari pembangunan nasional didasari pada prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

Sejalan dengan prinsip otonomi daerah, untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah, maka arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2017 adalah dengan meningkatkan kualitas belanja kabupaten/kota dengan sasaran rata-rata belanja modal sebesar 30% dari total belanja. Menurut Hasan & Nurhidayat (2016) semakin besarnya proporsi belanja modal terhadap belanja daerah secara keseluruhan merupakan salah satu ukuran kualitas belanja yang baik. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat.

Minimnya jumlah belanja modal yang dikeluarkan karena belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai, dapat menjadi salah faktor yang menyebabkan pemerintah mengalami kondisi *financial distress*. Menurut Jones & Walker (2007) *financial distress* pada sektor pemerintahan merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang ditetapkan. Sutaryo (2009) menyatakan bahwa ketidakmampuan pemerintah ini karena pemerintah tidak mempunyai ketersediaan dana untuk diinvestasikan pada infrastruktur yang digunakan dalam penyediaan pelayanan pada publik. Kondisi kekurangan atau ketidaktersediaan dana ini mengindikasikan bahwa pemerintah mengalami kesulitan keuangan.

Salah satu cara untuk menilai kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah adalah dengan menganalisis rasio keuangan. Menurut Mahmudi (2016) terdapat berbagai macam rasio keuangan pemerintah daerah antara lain rasio solvabilitas, rasio utang, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Sartika (2016) menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan dan rasio solvabilitas berpengaruh terhadap *financial distress*. Dalam penelitiannya, Sutaryo, Sutopo, & Rahmawati (2012) menemukan

bahwa rasio keuangan pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk memprediksi status *financial distress* pemerintah daerah. Yanti (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa *budgetary solvency ratio* berpengaruh terhadap status *financial distress* pemerintah daerah.

2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah “semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.” Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan merupakan “laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tujuan laporan

keuangan terdiri atas tujuan umum dan tujuan spesifik. Tujuan umum laporan keuangan adalah: Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016) analisis laporan keuangan merupakan “kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik.”

Menurut Sujarweni (2017) analisis laporan keuangan adalah: Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat pada suatu keadaan keuangan perusahaan, bagaimana pencapaian keberhasilan perusahaan masa lalu, saat ini, dan prediksi di masa mendatang, analisis laporan keuangan tersebut akan digunakan dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Financial Distress Pada Sektor Pemerintahan

Menurut Ritonga (2014) bahwa kesulitan keuangan terjadi ketika pemerintah daerah tidak dapat mempertahankan layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Syurmita (2014) bahwa pada pemerintah daerah, *financial distress* ditandai dengan tidak terkendalinya pengeluaran yang dilakukan untuk belanja rutin, sehingga pemerintah daerah menekan pengeluaran untuk belanja modal atau belanja investasi.

Budgetary Solvency Ratio

Menurut Ritonga (2014) *budgetary solvency ratio* atau rasio solvabilitas anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan untuk mendanai operasinya selama satu periode laporan keuangan. Semakin tinggi nilai rasio ini maka menunjukkan semakin banyak pendapatan pemerintah daerah untuk membiayai belanja pemerintah daerah.

$$BSR = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Belanja}}$$

Pengembangan Hipotesis

Kemampuan total pendapatan pemerintah daerah dalam membiayai seluruh belanjanya dalam satu tahun anggaran dapat diukur menggunakan *budgetary solvency ratio*. *Budgetary solvency ratio* merupakan perbandingan antara total pendapatan pemerintah daerah dengan total belanja yang harus dikeluarkan. Semakin tinggi nilai rasio ini semakin baik kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai belanja daerahnya. Ritonga et al. (2012) mengatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara total pendapatan yang ada dengan total belanja yang harus dikeluarkan. Semakin tinggi nilai dari rasio ini maka semakin baik kemampuan pendapatan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya, termasuk belanja daerah yang nantinya akan mendatangkan manfaat jangka panjang yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Sehingga semakin tinggi nilai dari dimensi *budgetary solvency ratio* ini maka semakin rendah kemungkinan terjadinya *financial distress* pemerintah daerah.

Sebaliknya, hasil penelitian Yanti (2018) menunjukkan bahwa *budgetary solvency ratio* berpengaruh positif terhadap prediksi *financial distress* pemerintah daerah. Artinya semakin tinggi nilai dari dimensi *budgetary solvency ratio* ini maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya *financial distress* pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa *budgetary solvency ratio* berpengaruh negatif terhadap prediksi *financial distress* pemerintah daerah.

H_1 : *Budgetary Solvency Ratio* berpengaruh negatif terhadap prediksi *Financial Distress* pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2015-2017.

Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Data laporan keuangan diperoleh melalui publikasi data dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan.

Variabel Penelitian

Variabel *Dependen*

Variabel *dependen* dalam penelitian ini adalah status *financial distress* pemerintah daerah yang didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik karena belanja modal yang dialokasikan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Status *financial distress* dalam penelitian ini diproyeksikan dengan rasio belanja modal terhadap total belanja. Menurut Mahmudi (2016) rasio belanja modal terhadap total belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Variabel *Independen*

Menurut Ritonga, Clark, & Wickremasinghe (2012) *budgetary solvency ratio* digunakan untuk mengukur perbandingan antara total pendapatan yang ada dengan total belanja yang harus dikeluarkan. *Budgetary solvency ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Teknik Analisis Data

Perumusan Model

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dengan pengujian menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) Versi 20. Analisis regresi linier sederhana ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$FD = \alpha + \beta_1 BSR + e$$

Keterangan:

FD : *Financial Distress*

BSR : *Budgetary Solvency Ratio*

α : konstanta

β : koefisien regresi

e : *error*

Uji Normalitas Residual

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau *residual* mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi *residual* normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik. Test statistik yang digunakan antara lain *Kolmogorov-Smirnov Test* (Ghozali, 2009: 107-114).

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel *dependen*. Nilai kemampuan variabel-variabel *independen* dalam menjelaskan variabel *dependen* amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel *independen* memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel *dependen* (Ghozali, 2009).

Uji Statistik T

Uji statistik t untuk menguji antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha=0,05$). Uji ini dilakukan untuk melihat koefisien regresi secara individual variabel penelitian (Ghozali, 2011). Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t-hitung dengan t-tabel penarikan simpulan pada uji ini didasarkan pada: Jika t hitung > t tabel, H_0 diterima, dan Jika t hitung < t tabel, H_0 ditolak.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Analisis Deskriptif

Data yang berdistribusi normal ditunjukkan dengan nilai signifikansi diatas 0,05 atau 5%.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Mini mum	Maxi mum	Mea n	Std. Deviation
BSR	83	1.94	109.23	31.8969	45.89823
FD	83	1.16	3.98	2.0488	.91147
Valid N (listwise)	83				

Sumber: Output SPSS

Dari tabel 1 dapat terlihat bahwa, dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi sampel, terhitung selama periode 5 tahun dan menjadikan hasil objek dalam penelitian ini sebanyak (N) 83. Dari hasil pengujian deskriptif didapatkan hasil berupa nilai N atau total pengujian setiap sampel, nilai minimum dari setiap sampel yang di uji, nilai maximum dari setiap sampel yang di uji, nilai mean dan standar deviasi untuk setiap sampel independen maupun dependen dari setiap sampel yang di uji.

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa, pada variabel independen *Budgetary Solvency Ratio* (BSR) diperoleh nilai minimum (terendah) 1,94, kemudian nilai maximum (tertinggi) 109,23, nilai mean (rata-rata) 31,8969 serta standar deviasinya sebesar 45,89823. Kemudian untuk variabel dependen *Financial Distress* (FD) diperoleh nilai minimum (terendah) sebesar 1,16, kemudian nilai maximum (tertinggi) 3,98, selanjutnya nilai mean (rata-rata) sebesar 2,0488 serta standar deviasinya sebesar 0,91147.

Uji Normalitas Data

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov untuk setiap variabel adalah sebagai berikut; *Budgetary Solvency Ratio* (BSR) bernilai 0,441 dan *Financial Distress* (FD) bernilai 0,417, hal ini berarti H_0 diterima yang berarti data terdistribusi secara normal.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	BSR	FD
N	83	83
Normal	462.5663	274726903
Parameters ^{a,b}		
Mean	3	30.0241
Std. Deviation	7.84172	1277873237.58428
Most Extreme Differences	.095	.097
Positive	.095	.088
Negative	-.083	-.097
Kolmogorov-Smirnov Z	.866	.882
Asymp. Sig. (2-tailed)	.441	.417

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.972 ^a	.944	.944	.21633

- a. Predictors: (Constant), BSR

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) adalah sebesar 0.944. Hal ini menunjukkan bahwa 94% variabel *Financial Distress* (FD) dipengaruhi oleh *Budgetary Solvency Ratio* (BSR). Sedangkan sisanya 6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi, dengan begitu dapat dikatakan bahwa tingkat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah sangat kuat.

Uji Statistik F

Tabel 4
Uji Statistik F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	64.333	1	64.333	1374.687	.000 ^b
Residual	3.791	81	.047		
Total	68.123	82			

a. Dependent Variable: FD

b. Predictors: (Constant), BSR

Sumber: Output SPSS

Tabel 4 mengidentifikasi bahwa, pada model regresi yang digunakan menghasilkan nilai F_{hitung} sebesar 1374,687 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. Hasil pengujian hipotesis, memberikan bukti bahwa adanya kelayakan model regresi pada penelitian. Hal tersebut disesuaikan dengan kriteria pengambilan keputusan. Terlihat bahwa Sig 0,000 < nilai alpha 0,05 maka H_0 ditolak dan menerima H_a , maka model regresi pada penelitian yang digunakan ini dianggap layak.

Uji Statistik T

Tabel 5
Hasil Uji Statistik T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.433	.029		49.468	.000
BSR	.019	.001	.972	37.077	.000

a. Dependent Variable: FD

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat terlihat bahwa nilai konstanta $\alpha = 1,433$ dan koefisien $b_1 = 0,19$ sehingga persamaan regresinya terjadi :

$$Y = 1,433 + 0,019 X + e$$

Nilai konstanta sebesar 1,433 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai *Budgetary Solvency Ratio* maka nilai *Financial Distress* sebesar 1,433. Koefisien regresi untuk *Budgetary Solvency Ratio* sebesar 0,19 menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan X maka akan meningkatkan *Financial Distress* sebesar 0,19.

Berdasarkan tabel 5 diperoleh t_{hitung} *Budgetary Solvency Ratio* (BSR) yaitu sebesar 37.077 dan nilai signifikansi sebesar 0,00. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari alpha (0,00 < 0,05) maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Sehingga hasil uji hipotesis adalah *Budgetary Solvency Ratio* (BSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financial Distress* (FD).

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh nilai signifikansi variabel *budgetary solvency ratio* sebesar 0,00. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian yaitu 0,05 (0,00 < 0,05). Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa *budgetary solvency ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap status *financial distress* pemerintah daerah. Maka penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa *budgetary solvency ratio* berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pemerintah daerah. Nilai koefisien *budgetary solvency ratio* yang bernilai 0,19 menunjukkan bahwa ketika rasio kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, dan rasio solvabilitas bernilai konstan, maka setiap satu kenaikan nilai *budgetary solvency ratio* akan menaikkan nilai *odds financial distress = log probabilitas financial distress (Y₀)* dibagi non *financial distress (Y₁)* sebesar 0,19.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ritonga et al. (2012) yang mampu membuktikan bahwa semakin tinggi nilai dari dimensi *budgetary solvency ratio* ini maka semakin rendah kemungkinan terjadinya *financial distress* pemerintah daerah.

Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah yang berasal dari tiga sumber tersebut digunakan untuk membiayai belanjanya

dalam satu tahun anggaran. Klasifikasi belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja daerah tersebut digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. *Budgetary solvency ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan pendapatan daerah dalam mendanai seluruh belanjanya. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan antara total pendapatan daerah dengan total belanja daerah yang harus dikeluarkan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Yanti (2018). Dalam penelitiannya, Yanti (2018) menemukan bahwa *budgetary solvency ratio* berpengaruh signifikan terhadap prediksi *financial distress* dengan nilai koefisien positif. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang positif antara *budgetary solvency ratio* dengan *financial distress*. Artinya, pemerintah daerah yang memiliki nilai *budgetary solvency ratio* yang tinggi diprediksi justru akan mengalami *financial distress*.

5. SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan yang didapat adalah: Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *budgetary solvency ratio* berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan arah koefisien positif. Semakin tinggi nilai *budgetary solvency ratio*, maka semakin tinggi kemungkinan pemerintah daerah mengalami *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi pengeluaran operasionalnya belum baik, sehingga pemerintah daerah tersebut tidak dapat terhindar dari *financial distress*.

Keterbatasan Penelitian

1. Sampel dalam penelitian ini hanya dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2013-2017. Sehingga tidak dapat dilakukan generalisasi untuk seluruh provinsi di Indonesia.

2. Penelitian ini tidak mempertimbangkan kejadian – kejadian lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap *Financial Distress*

Saran

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang dikemukakan di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya mengenai *Financial Distress*. Penelitian dimasa yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan-keterbatasan penelitian ini. Hal-hal yang mungkin dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian selanjutnya disarankan tidak hanya dari satu provinsi.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji variabel lain yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap *Financial Distress*.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H. 2012. “Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi”. *Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*. XXI(1). 1–19.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika (Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17)*. Badan Penebit Universitas Diponegoro: Semarang
- Hasan, M., & Nurhidayat, Y. 2016. *Laporan Analisis Anggaran Daerah 2016 Hasil Penelitian di 70 Kabupaten/Kota*. Seknas FITRA dan The Ford Foundation: Jakarta.
- Jones, S., & Walker, R. G. 2007. “Explanators of Local Government Distress”. *Abacus*. 43(3). 396–418.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YPKM: Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Ritonga, I., Clark, C., & Wickremasinghe, G. 2012. "Assessing Financial Condition of Local Government in Indonesia : an Exploration". *Public and Municipal Finance*, 1(2), 37-50.
- Ritonga. 2014. *Analisis Laporan Keuangan Pemda*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Sartika, D. 2016. Analisis Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2011-2013. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sujarweni, D. V. 2017. *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Sutaryo. 2009. Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Tesis*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Sutaryo, B. Sutopo, dan Rahmawati. 2012. Relevansi Informasi Laporan Keuangan Cash Modified Basis:Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Syurmita. 2014. Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII Lombok*.
- Yanti, R. D. 2018. Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status *Financial Distress* Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012-2016. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.